



Evaluasi Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Desa Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo

Sigit Agus Dwi Prasetyo^{1*}, Jihan Adi Safangat², Intan Imam Sutanto³, Samto⁴
^{1,2,3,4}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Karya Utama, Indonesia
email¹ sigit_dp2019@yahoo.com ; email² jihanadis838@gmail.com ; email³
sutanto.intanimam@gmail.com ; email⁴ samto080865@gmail.com

Jl. Tegalsari Raya No.102, Semarang, Indonesia

Korepondensi penulis; sigit_dp2019@yahoo.com

Abstract.

This study aims to evaluate the implementation of the Village Financial System (SISKEUDES) in villages in Kalikajar District, Wonosobo Regency. The study was conducted using a qualitative case study approach through interviews, observations, and documentation of village officials and sub-district officials. Primary data were obtained through interviews with 18 village officials in Kalikajar District. The results show that the implementation of SISKEUDES has had a positive impact on administrative order, reporting effectiveness, and village financial accountability. However, technical constraints such as server disruptions, unstable internet networks, and limited operator capabilities remain obstacles to system optimization. The study recommends increasing the capacity of village officials, strengthening network infrastructure, and optimizing technical assistance from sub-districts and local governments.

Keywords: Non Performing Loan, Loan to Asset Ratio, and Third Party Funds

Abstrak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) pada desa-desa di Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif studi kasus melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap perangkat desa serta pejabat kecamatan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan 18 perangkat desa di Kecamatan Kalikajar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SISKEUDES telah memberikan dampak positif terhadap ketertiban administrasi, efektivitas pelaporan, serta akuntabilitas keuangan desa. Namun demikian, kendala teknis seperti gangguan server, jaringan internet yang tidak stabil, dan keterbatasan kemampuan operator masih menjadi hambatan dalam optimalisasi sistem. Penelitian merekomendasikan peningkatan kapasitas aparatur desa, penguatan infrastruktur jaringan, serta optimalisasi pendampingan teknis dari kecamatan dan pemerintah daerah.

Kata kunci: Sistem Keuangan Desa, Siskeudes, Akuntabilitas, Implementasi Kebijakan, Teknologi Informasi

1. LATAR BELAKANG

Pengelolaan keuangan desa menjadi bagian penting dalam tata kelola pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber pendapatannya sendiri, termasuk Pendapatan Asli Desa (PAD), Alokasi Dana Desa, dana transfer dari APBN, serta pendapatan sah lainnya.

Untuk mendukung tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sistematis, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Kementerian Dalam Negeri mengembangkan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Aplikasi ini dirancang untuk membantu pemerintah desa dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa secara terstruktur dan sesuai regulasi.

Meski seluruh desa di Kecamatan Kalikajar telah mengimplementasikan SISKEUDES, ditemukan berbagai kendala seperti ketidakstabilan jaringan internet, keterlambatan pelaporan, kurangnya pemahaman operator, hingga gangguan teknis berupa sistem yang keluar secara otomatis (*force logout*) (Agustina, 2024). Fenomena tersebut menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap implementasi SISKEUDES.

2. KAJIAN TEORITIS

Sistem Keuangan Desa

Sistem keuangan desa merupakan rangkaian proses pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban (K. Indonesia, 2018), sedangkan pengelolaan dan pengawasan keuangan desa diatur dalam Permendagri No. 73 Tahun 2020 (K. D. N. R. Indonesia, 2020). Sistem ini menekankan transparansi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam setiap proses administrasi keuangan.

Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) adalah aplikasi berbasis komputer yang dikembangkan untuk mendukung tata kelola keuangan desa secara efektif, efisien, dan sesuai regulasi. Menurut (Wijayandanu & Astuti, 2020), SISKEUDES mampu meningkatkan ketertiban administrasi keuangan desa karena fitur-fiturnya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian terbaru (Utami et al., 2023) menyebutkan bahwa SISKEUDES berperan besar dalam mempercepat penyusunan laporan keuangan desa dan meningkatkan pengawasan berbasis teknologi informasi.

Evaluasi Implementasi Kebijakan

Menurut Ndraha (2003), evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas, kecukupan, dan ketepatan suatu kebijakan dengan menggunakan Indikator evaluasi Ndraha yang terdiri:

- a Efektivitas: sejauh mana tujuan kebijakan tercapai.

- b Kecukupan: apakah hasil kebijakan mampu menyelesaikan masalah.
- c Ketepatan: sejauh mana manfaat kebijakan sesuai kebutuhan masyarakat dan pemerintah.

Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan saran untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Menurut Edward III implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Hidayat & Kemala, 2024).

Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dibangun atas hubungan antara teori implementasi kebijakan, efektivitas penggunaan teknologi informasi, serta kualitas tata kelola keuangan desa. Implementasi SISKEUDES dievaluasi melalui alur: Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban. Untuk Evaluasi dilakukan menggunakan indikator Ndraha: efektivitas, kecukupan, dan ketepatan.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diolah dalam bentuk naratif untuk memahami fenomena secara mendalam. Penelitian ini dilakukan di beberapa Desa yang tergabung dalam Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa tengah dengan informan Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan, Sekretaris Desa, Operator SISKEUDES.

Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Data Primer: diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan. Data Sekunder berupa dokumen desa, laporan APBDes, laporan keuangan, pedoman penggunaan SISKEUDES

Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi dilaksanakan dengan melakukan pengamatan dan analisis mengenai mekanisme implementasi pengelolaan sistem keuangan desa di kecamatan Kalikajar, Wawancara dilakukan terhadap Kepala seksi pemerintahan kecamatan Kalikajar, sekretaris desa dan operator SISKEUDES untuk mengetahui

bagaimana pelaksanaan dan penerapan SISKEUDES dan kendala dan hambatan yang dialami desa kecamatan Kalikajar. Kegiatan dokumentasi untuk mendapatkan catatan-catatan, transkrip, buku dan tabel

Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data pada penelitian ini menggunakan model analisis data (Miles et al., 2014) yang dilakukan dalam tiga tahapan utama yang dilakun dengan mereduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan *Conclusion drawing/verification*).

Uji Keabsahan Data

Untuk uji keabsahan data pada penelitian ini khususnya untuk melihat bagaimana implementasi SISKEUDES di Kecamatan Kalikajar dengan melakukan reduksi data dengan beberapa tahapan, meliputi:

1. Mengidentifikasi informasi penting berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
2. Menyaring pernyataan informan yang relevan dengan kategori analisis, seperti efektivitas, kecukupan, ketepatan, penggunaan teknologi, dan hambatan implementasi.
3. Menghapus data yang tidak relevan, bersifat pengulangan, atau tidak mendukung fokus penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kecamatan Kalikajar

Kecamatan Kalikajar terdiri dari 18 desa dan seluruhnya telah menggunakan SISKEUDES secara penuh sejak 2022 (*offline*) dan 2023 (*online*). Pemerintah kecamatan secara berkala melakukan pendampingan teknis kepada perangkat desa.

Evaluasi Implementasi Prosedur SISKEUDES

a. Perencanaan

Pada tahap perencanaan, seluruh desa di Kecamatan Kalikajar memulai proses penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) melalui musyawarah desa yang melibatkan unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, hingga lembaga kemasyarakatan. Hasil musyawarah tersebut berisi prioritas pembangunan, program pemberdayaan masyarakat, serta kebutuhan operasional pemerintahan desa.

Setelah RKPDes difinalisasi, desa menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai dokumen anggaran tahunan yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Pada tahap ini, aplikasi SISKEUDES berperan sangat penting sebagai alat bantu untuk menginput seluruh rencana kegiatan dan estimasi anggaran ke dalam sistem secara terstruktur. Operator SISKEUDES memasukkan data usulan kegiatan sesuai kode rekening, pagu anggaran, jadwal pelaksanaan, dan jenis belanja. Dengan adanya sistem ini, perencanaan menjadi lebih transparan dan terdokumentasi, serta meminimalkan potensi kesalahan pencatatan. Beberapa operator desa juga menyampaikan bahwa proses input perencanaan di SISKEUDES membantu memverifikasi kecocokan antara RKPDes dan APBDes sehingga tidak terjadi inkonsistensi antar dokumen.

b. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan realisasi kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes. Pada tahap ini, operator SISKEUDES melakukan pencatatan yang lebih teknis dan rinci. Setiap pencairan dana kegiatan, baik yang berhubungan dengan belanja barang, jasa, maupun pembayaran upah pekerja, harus didukung dengan bukti transaksi berupa kwitansi, nota, ataupun dokumen pendukung lain.

Data yang telah diinput akan secara otomatis mempengaruhi posisi anggaran, sehingga desa mengetahui seberapa besar penyerapan anggaran dan sisa saldo setiap kegiatan. Menurut wawancara dengan beberapa operator desa, SISKEUDES membantu menghindari duplikasi pencatatan dan memastikan bahwa setiap realisasi belanja terekap dengan baik, meskipun beberapa operator mengaku masih memerlukan pendampingan untuk memahami fitur pelaksanaan secara lebih menyeluruh.

c. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan tahap administratif internal yang tidak hanya mencatat belanja namun juga seluruh aliran kas masuk maupun keluar. Bendahara desa bekerja sama dengan operator untuk memastikan setiap transaksi keuangan masuk ke dalam Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu Pajak, Buku Pembantu Bank dan Buku Pembantu Kegiatan.

SISKEUDES menyediakan fitur otomatis yang memudahkan desa dalam memposting setiap transaksi ke buku-buku pembantu tersebut. Penatausahaan menjadi lebih tertib karena setiap transaksi memiliki nomor bukti, tanggal, rincian belanja, dan

kode akun. Bendahara desa juga menyatakan bahwa sebelum adanya SISKEUDES, proses pembukuan dilakukan manual dan rawan kesalahan, namun kini buku kas dapat dicetak kapan saja dan langsung sinkron dengan realisasi kegiatan. Walaupun sudah ada SISKEUDES masih ada beberapa desa yang menghadapi keterbatasan dalam unggah dokumen pendukung sehingga arsip fisik tetap diperlukan sebagai lampiran laporan, yang menjadikan proses administrasi masih belum sepenuhnya digital

d. Pelaporan

Tahap pelaporan merupakan tahapan yang paling dirasakan manfaatnya oleh seluruh desa di Kecamatan Kalikajar. SISKEUDES menyediakan fitur otomatis untuk menghasilkan berbagai jenis laporan keuangan desa untuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu Kegiatan, Buku Pembantu Pajak, Selain itu, sistem juga memungkinkan penyusunan laporan konsolidasi secara cepat apabila data transaksi sudah lengkap dan benar.

Operator desa menyampaikan bahwa fitur otomatisasi laporan sangat membantu, karena sebelumnya laporan harus disusun manual dengan perhitungan excel yang memakan banyak waktu dan rawan kesalahan. Dengan SISKEUDES, laporan dapat dicetak pada akhir bulan, triwulan, atau akhir tahun dan langsung disampaikan ke kecamatan sebagai bentuk pelaporan berkala.

e. Pertanggungjawaban

Tahap pertanggungjawaban merupakan puncak dari seluruh proses pengelolaan keuangan desa. Laporan yang telah dihasilkan dari SISKEUDES menjadi bahan utama dalam Musyawarah Pertanggungjawaban (Musdes LPJ). Setelah dipaparkan dalam forum desa, laporan diserahkan kepada kecamatan untuk diverifikasi. Kecamatan melakukan pengecekan kesesuaian antara laporan di aplikasi dengan bukti fisik dan dokumen pendukung. Setelah dinyatakan benar, laporan keuangan diteruskan ke kabupaten untuk proses evaluasi dan pengesahan.

Laporan pertanggungjawaban selain sebagai bentuk akuntabilitas, juga menjadi dasar perencanaan tahun berikutnya. Pegawai kecamatan menyatakan bahwa penggunaan SISKEUDES sangat memudahkan proses verifikasi karena format laporan telah baku dan sesuai pedoman peraturan.

f. Implementasi SISKEUDES

Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat desa, implementasi SISKEUDES di Kecamatan Kalikajar dapat dinilai cukup efektif. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Operator SISKEUDES Desa:

“Dengan adanya SISKEUDES, pencatatan keuangan desa menjadi lebih rapi dan teratur. Laporan juga bisa disusun lebih cepat dibandingkan sebelum menggunakan aplikasi.”

Dengan adanya SISKEUDES membantu Desa dalam mempercepat proses penyusunan laporan, melakukan pencatatan keuangan secara lebih sistematis, meningkatkan ketepatan akuntansi, serta memperkuat pengawasan melalui sistem yang terintegrasi.

Peralihan dari SISKEUDES offline ke SISKEUDES online pada tahun 2023 juga membawa dampak positif, terutama dalam hal sinkronisasi data ke kabupaten secara real-time namun demikian, beberapa kendala teknis masih dialami oleh pemerintah desa terutama pada jaringan internet tidak stabil khususnya pada desa-desa yang berada di wilayah pegunungan berakibat pada sistem sering keluar otomatis (force logout) ketika koneksi terganggu karena sistem online terhubung langsung dengan server BPKP. Hal ini diungkapkan oleh operator SISKEUDES Desa:

“Kalau jaringan internet tidak stabil, aplikasi sering keluar sendiri. Kadang saat input data belum selesai, tiba-tiba logout, jadi harus mengulang lagi.”

Masih ada beberapa operator desa masih memiliki keterbatasan kemampuan teknis dalam mengoperasikan seluruh fitur aplikasi. Seorang informan menyatakan bahwa:

“Tidak semua fitur bisa langsung dipahami, terutama bagi operator yang baru. Kalau belum paham, biasanya kami tunda dulu inputnya sambil menunggu pendampingan

Kendala tersebut membuat proses input data menjadi terhambat dan sering tertunda.

g. Pemanfaatan Teknologi

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan perangkat desa pemanfaatan teknologi informasi melalui penggunaan SISKEUDES memberikan dampak signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Pemanfaatan teknologi informasi melalui

penggunaan SISKEUDES mempercepat proses administrasi keuangan, mempermudah penyimpanan data secara aman, mengurangi kesalahan pencatatan, menyediakan laporan keuangan otomatis sesuai regulasi, mendukung pengawasan real-time oleh kecamatan, kabupaten, dan inspektorat.

Pemanfaatan teknologi informasi mengalami hambatan pada pembangunan infrastruktur terutama bagi desa yang berada jauh dari pusat kecamatan sering mengalami internet yang lambat sehingga proses input, sinkronisasi, dan akses server terganggu. Selain itu, kapasitas sumber daya manusia juga berpengaruh terhadap pemanfaatan teknologi. Operator desa yang kurang berpengalaman membutuhkan pelatihan lanjutan agar dapat memaksimalkan fungsi SISKEUDES.

Evaluasi Implementasi SISKEUDES

Efektivitas

Berdasarkan evaluasi menggunakan indikator (Ndraha, 2003), pelaksanaan Implementasi SISKEUDES di desa yang berada di wilayah Kalijajar dinilai sudah efektif karena mampu mempercepat proses penyusunan laporan, menertibkan administrasi keuangan, meningkatkan kualitas pencatatan serta mendorong akuntabilitas keuangan desa. Walaupun pelaksanaan Implementasi SISKEUDES sudah efektif masih mengalami hambatan pada gangguan server dan jaringan internet yang tidak stabil. Hasil evaluasi ini didukung oleh pernyataan operator SISKEUDES Desa:

“Sebelum ada SISKEUDES, laporan keuangan desa disusun manual dan memakan waktu lama. Sekarang laporan bisa lebih cepat dan formatnya sudah otomatis sesuai aturan. Administrasi keuangan desa jadi lebih tertib karena semua transaksi harus diinput ke sistem, jadi tidak bisa sembarangan.”

Hasil ini sejalan dengan penelitian (Wijayandanu & Astuti, 2020) menyatakan bahwa implementasi SISKEUDES mampu meningkatkan ketertiban administrasi keuangan desa karena sistem dirancang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Temuan bahwa SISKEUDES berperan signifikan dalam mempercepat penyusunan laporan keuangan desa serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berbasis teknologi informasi serupa dengan penelitian (Utami et al., 2023) dan (Pramesti et al., 2023).

Kecukupan

Dari sudut pandang kecukupan, aplikasi ini dirasakan sudah cukup memadai didalam memenuhi kebutuhan administrasi keuangan desa. Aplikasi SISKEUDES mampu mengakomodasi seluruh proses mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban.

Kendati demikian, masih terdapat beberapa bidang yang belum otomatis sepenuhnya pada pengunggahan dokumen fisik, pencocokan bukti transaksi, penanganan pajak yang masih membutuhkan input manual hal menjadikan operator harus tetap mengelola arsip fisik sebagai pelengkap.

Ketepatan

Dilihat dari sudut pandang kecukupan manfaat aplikasi SISKEUDES dinilai sudah tepat sasaran, hal ini telah mampu meningkatnya transparansi keuangan desa, kemudahan pengawasan oleh kecamatan dan kabupaten, berkurangnya risiko penyimpangan, kesesuaian laporan dengan regulasi akuntansi pemerintahan. Ketepatan implementasi aplikasi SISKEUDES sangat ditentukan dari adanya kedisiplinan operator, keterampilan SDM, stabilitas teknologi dan efektivitas pendampingan dari kecamatan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi SISKEUDES di Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo telah berjalan cukup efektif dalam mendukung pengelolaan keuangan desa. Sistem ini mampu mempercepat proses administrasi, menertibkan pencatatan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui penyediaan laporan otomatis yang sesuai dengan regulasi. Pada tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban, SISKEUDES telah membantu desa dalam mengelola dokumen RKPDes, APBDes, realisasi kegiatan, penatausahaan transaksi, serta penyusunan laporan keuangan secara lebih sistematis.

Meskipun demikian, implementasi SISKEUDES belum optimal sepenuhnya. Kendala teknis seperti ketidakstabilan jaringan internet, gangguan server, serta keterbatasan kompetensi operator masih menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan harian sistem. Keterbatasan tersebut berdampak pada keterlambatan input data, kesalahan penggunaan fitur, dan ketergantungan desa terhadap pendampingan dari kecamatan.

Infrastruktur teknologi dan kemampuan SDM terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan implementasi sistem.

Berdasarkan indikator evaluasi Ndraha, SISKEUDES dinilai efektif dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa, cukup memadai dalam memenuhi kebutuhan administratif meskipun masih memerlukan penyempurnaan fitur, serta tepat sasaran dalam mendukung transparansi dan pengawasan oleh kecamatan dan kabupaten. Dengan demikian, implementasi sistem telah berkontribusi positif terhadap tata kelola keuangan desa, namun masih memerlukan penguatan dari sisi teknologi, pelatihan, dan dukungan kebijakan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi sistem informasi desa tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan aplikasi, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia, kondisi infrastruktur, serta konsistensi pendampingan teknis. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan peningkatan kapasitas aparatur desa dan penguatan infrastruktur digital guna mendukung keberlanjutan pengelolaan keuangan desa berbasis teknologi.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan, diperlukan beberapa rekomendasi yang dapat menjadi acuan bagi pemerintah desa, kecamatan, maupun pemerintah daerah dalam mengoptimalkan implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Peningkatan kapasitas dan kompetensi operator SISKEUDES. Pemerintah desa dan kecamatan disarankan untuk menyelenggarakan pelatihan rutin dan berkelanjutan bagi operator dan bendahara desa. Pelatihan tidak hanya berfokus pada penggunaan fitur dasar SISKEUDES, tetapi juga pada pengelolaan data, pemecahan masalah teknis, pemahaman regulasi terbaru, serta tata kelola keuangan desa yang baik.

Penguatan infrastruktur jaringan internet di tingkat desa. Pemerintah daerah bersama penyedia layanan internet perlu memperhatikan kondisi jaringan di desa-desa yang berada di wilayah pegunungan atau jauh dari pusat kecamatan. Konektivitas yang stabil sangat diperlukan karena SISKEUDES versi online bergantung pada akses jaringan yang memadai. Peningkatan kualitas jaringan akan secara langsung meningkatkan efisiensi input data dan meminimalkan terjadinya gangguan seperti force logout atau gagal sinkronisasi.

Peneliti berikutnya disarankan untuk mengembangkan kajian pada aspek lain seperti dampak implementasi SISKEUDES terhadap pembangunan desa, pengawasan internal, atau kepatuhan pajak desa. Selain itu, penelitian dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed methods untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif terkait efektivitas dan pengaruh sistem terhadap tata kelola pemerintahan desa.

DAFTAR REFERENSI

- Assyahri, A., & Vaguita, R. (2020). *Evaluasi Kebijakan Publik*.
- Agustina, I. F. (2024). Kendala dan Solusi Penerapan Siskeudes dalam Upaya Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas di Desa Tanggungnung, Kecamatan Tanggungnung Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)*, 2(3), [halaman jika tersedia]. [https://doi.org/\[DOI jika tersedia\]](https://doi.org/[DOI jika tersedia])
- Hidayat, A., & Kemala, F. (2024). Implementation of State Property Management Policy at the Secretariat General of the General Election Supervisory Agency Republic of Indonesia. *JIRPL Journal of Indonesia Law and Policy Review*, 3(2), [halaman jika tersedia]. <https://ejournal.aissrd.org/index.php/jirpl/article/view/59>
- Indonesia, K. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Peraturan Menteri Dalam Negeri)*. <https://peraturan.bpk.go.id/Download/131060/Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.pdf>
- Indonesia, K. D. N. R. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Peraturan Menteri Dalam Negeri)*. <https://peraturan.bpk.go.id/Download/156010/Permendagri Nomor 73 Tahun 2020.pdf>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Sage Publications.
- Ndraha, T. (2003). *Kybernology: Ilmu Pemerintahan Baru*. Rineka Cipta.
- Pramessti, T. B., Sulistyowati, N., & Nuraina, E. (2023). Evaluasi Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)*, 1(2), 293–300. <https://journal.ppmi.web.id/index.php/jakpg/article/view/278>
- Utami, O. P., Agustin, E., & Priyono, N. (2023). Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA)*, 1(3), [halaman jika tersedia]. <https://ejurnal.stie-trianandra.ac.id/index.php/jumia/article/view/1489>
- Wijayandanu, K. A., & Astuti, P. (2020). Evaluasi Implementasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) Online di Kabupaten Pati Pada Tahun 2018–2020. *Journal of Politic and Government Studies*, 9(04), 399–410. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/28926>